**SEJARAH DAN PENDIDIKAN ORDE BARU**

**PARWIS SIREGAR**

**2013920004**

Abstrak

Pada tanggal 30 September, kaum komunis telah melakukan pemberontakan pula dalam Negara Republik Indonesia. Pemberontakan PKI di madiun yang dipimpin Muso,dalam hal ini indonesia mengalami bahaya yang berintregrasi pemberontakan PKI, kekuasaan orla, kehancuran ekonomi. Jenderal Suharto telah memimpin bangsa Indonesia berjuang melawan ketiga bahaya tersebut. Dengan pertimbangan dan strategi yang matang bahaya tersebut dapat dikalahkan satu persatu kehancuran ekonomi dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi, stabilisasi, dan pemnagunan. Sesudah itu pemerintah dan rakyat Indonesia bertekad melaksanakan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bermasyarakat berdasarkan Ideologi negara pancasila dan konstitusi (UUD 1945).

Dalam pemerintahan orde baru yang di pimpin oleh Suharto dalam pemerintahannya dalam pembangunan nasional yang di upayakan dalam merealisasikan kebijakan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang kita ketahui dengan sebutan pelita yang di mana setiap tahun nya ada nya rancangan pembangunan setiap lima tahunnya dalam rangka setiap misinya mencapai tingkat kesejahteraan rakyat. Dan tidak lupa dalam sektor pendidikan merupakan satu bagian yang sangat penting bagi bangsa dalam mempercepat kebijakan yang di agendakan tingkat mutu pendidikan itu sendiri agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan arti pendidikan dan belajar dalam mendapatkan ilmu yang diberikan tentu saja suatu tujuan terciptanya pendidikan yang stabil di perlukan kebijakan-kebijakan yang diterapkan agar nantinya dapat di aplikasikan dan memberikan kontribusi sebagai masa depan.

Kata Kunci : Suharto, Sistem dan Mutu Pendidikan, Asal Mula Pendidikan di Orde Baru, Kebijakan, Kurikulum,Dampak Yang ditimbulkan.

Rumusan Masalah : pemerintah Orde Baru berkehendak menyususn sistem ketatanegaraan berdasarkan asas demokrasi pancasila. Dan hasil yang di laksanakan dalam membangun pendidikan yang menjadi pusat penting dalam tahap pembangunan negara serta kekuatan ekonomi masyarakat yang menjadikan negara yang sehingga terciptanya pembangunan dan kemajuan di sektor kebijakan yang diambil pada masa era suharto.

Langkah yang dilakukan Suharto dalam pendidikan pada era orde baru?

Sejauh mana pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Suharto ?

Bagaimana dampak atas kebijakan pada masa Suharto?

Strategi pendidikan yang di buat pada masa orde baru?

Pendahuluan

Selama kurun waktu ini sistem pendidikan guru di Indonesia mengalami berbagai perubahan, termasuk perubahan dalam cara bagaimana para siswa dipersiapkan menjadi guru-guru yang kompeten. Apalagi selama masa orde lama dan orde baru terjadi periode yang mencakup zaman Demokrasi Liberal (1950-1959) dan zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang merupakan periode yang ditandai dengan kekacauan politik dan kemerosotan ekonomi. Tentu ini mempengaruhi perkembangan pendidikan guru di Indonesia.[[1]](#footnote-1) Selama masa orde lama terjadi ekspansi sistem pendidikan guru SD, pembangunan dibidang pendidikan, ekspansi sistem pendidikan guru Sekolah Menengah. Selama orde baru terjadi pembanguna dibidang pendidikan, peningkatan mutu pendidikan kejuruan, peningkatan mutu pendidikan umum, masalah pembaharuan kurikulum, dan pembangunan dibidang pendidikan guru. Jadi dalam makalah ini dibahas perkembangan pendidikan guru pada masa orde lama dan orde baru.

Orde Lama

Sistem Pembangunan di bidang Pendidikan

Sistem pendidikan guru di Indonesia mulai dibenahi secara fisik sejak 1950. Awal 1950, ketika bentuk negara Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk membangun kembali sistem pendidikan untuk seluruh wilayah Indonesia, harus diadakan persetujuan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Republik Indonesia. Piagam persetujuan ini ditandatangani oleh Drs. Mohamad Hatta selaku Perdana Menteri RIS dan Dr. A. Halim selaku Perdana Menteri RI pada 19 Mei 1950. Ketentuan piagam ini antara lain kedua pihak menyetujui pembentukan suatu panitia yang bertugas menyelenggarakan pengajaran dan persetujuan untuk menyelesaikan kesukaran-kesukaran diberbagai lapangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.  
  
Berdasarkan persetujuan tersebut dibentuklah suatu panitia bersama dari Kementrian Pendidikan, pengajaran, dan Kebudayaan RIS (PPK RIS) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (PPK RI). Hasil perundingan ini diumumkan tanggal 30 Juni 1950 dan ditandatangani oleh Dr. J. Leimena selaku menteri PPK RIS dan S. Mangunsarkoro selaku menteri PPK RI. Hasil perundingan berupa ketentuan mengenai susunan sekolah negeri. Berdasarkan ketentuan . Berdasarkan ketentuan ini, perbedaan-perbedaan dalam sistem persekolahan yang ada antara RI dan negara-negara bagian lainnya dari RIS ditiadakan, dan semuanya memakai sistem persekolahan RI. Ketika seluruh wilayah Indonesia menjadi republik Indonesia, maka penyeragaman sistem pendidikan di persekolahan seluruh Indonesia selesai digarap.[[2]](#footnote-2)

Orde Baru

Pembangunan di Bidang Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan memiliki 2 fungsi dalam keseluruhan kerangka pembangunan ekonomi yaitu:

1. Mengusahakan agar kesempatan mendapatkan pendidikan menjadi terjangkau oleh semua masyarakat.
2. Meningkatkan secara berangsur-angsur kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang bermutu.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada masa Orde Baru:[[3]](#footnote-3)

1. Peningkatan mutu pendidikan kejuruan : Peningkatan ini melalui memutakhirkan struktur pendidikan kejuruan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam struktur pendidikan kejuruan yang baru muncul sekolah-sekolah menengah kejuruan dibidang manajemen bisnis, pariwisata, dan perhotelan. Padahal dulu hanya ada 4 jenis sekolah menengah kejuruan yaitu pertanian, tehnik, ekonomi, dan kejuruan rumah tangga. Selanjutnya adalah memodernisasi program pendidikan atau kurikulum di semua bidang kejuruan dari pertanian teknologi sampai kejuruan rumah tangga.Tindakan darurat : Tamatan SGA yang menurut rencana semula akan ditempatkan sebagai guru SD diangkat menjadi guru SMP dan SGB. Pada tahun 1952 dibangun Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP). Lama pendidikan PGSLP mula-mula ditetapkan 1 tahun, namun mulai 1 September 1958 lama pendidikan ini diperpanjang menjadi 2 tahun dan lamanya diubah menjadi Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA). Siswa PGSLP ini diambil dari para lulusan SGA yang telah ditempatkan sebagai guru sekolah menengah. PGSLP ditutup secara menyeluruh pada 1978/1979.
2. Peningkatan mutu pendidikan umum : Peningkatan pendidikan ini dilakukan melalui peningkatan mutu guru melalui penatara-penataran guru dalam jabatandan peningkatan mutu kurikulum SD sampai kurikulum SMU. Dari program-program penataran ini lahir PPPG (Pusat Pengembangan Penataran Guru). Sejak tahun 1977 sampai 1991 didirikan 6 PPPG untuk peningkatan pendidikan umum dan 4 PPPG untuk peningkatan pendidikan kejuruan.
3. Pembaharuan kurikulum : Sejak 1968 terjadi pembaharuan kurikulum dari tingkat SD sampai tingkat SMU dan selesai tahun 1975. Pembaharuan ini berupa perubahan cara mengemas seluruh materi pembelajaran. Misal mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi disebut ilmu pengetahuan alam, sedangkan geografi, sejarah, dan kwarganegaraan disebut ilmu pengetahuan sosial. Program pendidikan sekolah dari SD sampai SMU pada dasarnya terdiri dari 4 mata pelajaran saja yaitu bahasa, matematika, IPA, dan IPS.[[4]](#footnote-4)
4. Pembanguanan di bidang pendidikan Guru pra jabatan : Berdasarkan laporan-laporan, ada 2 langkah dasar yang dilakukan pemerintah orde baru untuk memodernisasikan pendidikan keguruan yang bersifat pra jabatan. Langkah-langkahnya yaitu: a. Menyergamkan jenjang pendidikan guru pra jabatan, dari sistem yang merupakan gabungan antara jenjang pendidikan menengah dan jenjang perguruan tinggi menjadi sistem yang bersifat strata tunggal, yaitu semua pendidikan guru pra jabatan diselenggarakan pada jenjang perguruan tinggi. b. Menentukan semua pendidikan guru pra jabatan dikelola oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dengan dileburnya FKIP dan IPG pada tahun 1963 menjadi IKIP, pihak Departemen P dan K selaku pihak yang mempekerjakan para lulusan lembaga pendidikan guru merasa dikalahkan, pada tahun 1989 diputuskan semua pendidikan keguruan yang bersifat pra jabatan diselenggarakan pada jenjang perguruan tinggi. Jadi pengelolaan pendidikan keguruan dipegang oleh Departemen Jendral Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Pada Masa Orde Baru

Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan.

Pelaksanaan pendidikan pada masa orde baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan orde baru mengusung ideologi “keseragaman” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. EBTANAS, UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Selain itu, masa ini juga diwarnai dengan ideologi militeralistik dalam pendidikan yang bertujuan untuk melanggengkan *status quo* penguasa. Pendidikan militeralistik diperkuat dengan kebijakan pemerintah dalam penyiapan calon-calon tenaga guru negeri.

Pada pendidikan orde baru kesetaran dalam pendidikan tidak dapat diciptakan karena unsur dominatif dan submisif masih sangat kental dalam pola pendidikan orde baru. Pada masa ini, peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan.[[5]](#footnote-5) Beberapa hal negatif lain yang tercipta pada masa ini adalah:

1. Produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Sehingga, berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya (tidak memanusiakan manusia).
2. Lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial, dan banyaknya anak muda yang berpikiran positivistik
3. Hilangnya kebebasan berpendapat.

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mengedepankan moto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia”. Pada  tahun 1969-1970 diadakan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) dan menemukan empat masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Dan hasilnya digunakan untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K). pada masa orde baru dibentuk BP-7 yang menjadi pusat pengarus utamaan (*mainstreaming*) pancasila dan UUD 1945 dengan produknya mata ajar Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan penataran P-4. Ditahun 1980 mulai timbul masalah pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah “pengangguran terdidik” Depdiknas di bawah Menteri Wardiman Djojohadiningrat (kabinet pembangunan VI) mengedepankan wacana pendidikan “*link and match”* sebagai upaya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia pada masa itu.

Posisi Siswa Sebagai Subjek dalam Era Orde Baru

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa pada masa ini seluruh bentuk pendidikan ditujukkan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan nasional. Siswa sebagai peserta didik, dididik untuk menjadi manusia “pekerja” yang  kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan bukan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa.[[6]](#footnote-6)

1) Kurikulum 1968

Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dengan suatu pertimbangan untuk tujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.

Pada masa ini siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghapal teori-teori yang ada, tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Praktis, kurikulum ini hanya menekankan pembentukkan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja.

2) Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO (*management by objective*). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang  dikenal dengan istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional  umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi.

Pada kurikulum ini peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. Tiap guru harus detail dalam perencanaan pelaksanaan program belajar mengajar. Setiap tatap muka telah di atur dan dijadwalkan sedari awal. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap.[[7]](#footnote-7)

3) Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 mengusung *“process skill approach”.* Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Leaming* (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa juga diperankan dalam pembentukkan suatu pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan sesuatu.

4) Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini bentuk opresi kepada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan  lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.

Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi.

Kebijakan Orde Baru

Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintahan orde baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinisasi. Yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan orde baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi , diwajibkan untuk mengikuti penetaran P4 yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila. Proses indoktrinisasi ini tidak hanya menanamkan paham-paham orde baru, tetapi juga sistem pendidikan masa orde baru yang menolak segala bentuk budaya asing, baik itu yang mempunyai nilai baik ataupun mempunyai nilai buruk. Paham orde baru yang membuat kita takut untuk melangkah lebih maju.[[8]](#footnote-8)

Pendididkan pada masa Orde Baru

Dengan demikian, pendidikan pada masa orde baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Bahwa putusan pemerintah adalah putusan yang adiluhung yang tidak boleh dilanggar. Itulah doktrin orde baru pada sistem pendidikan kita.

Indoktrinisasi pada masa kekuasan Soeharto ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi, pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran. Pada masa itu, pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin . Semua serba kaku dan berjalan dalam sistem yang otoriter.

Ahkirnya, kebijakan pendidikan pada masa orde baru mengarah pada penyeragaman. Baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini menyebabkan generasi bangsa kita adalah generasi yang mandul. Maksudnya, miskin ide dan takut terkena sanksi dari pemerintah karena semua tindakan bisa-bisa dianggap subversif. Tindakan dan kebijakan pemerintah orde baru-lah yang paling benar. Semua wadah-wadah organisasi baik yang tunggal maupun yang majemuk, dibentuk pada budaya homogen. Bahkan partai politik pun dibatasi. Hanya tiga partai yang berhak mengikuti Pemilu. Bukankah kebijakan ini sudah melanggar undang-undang dasar 45 yang menjadi dasar dari berdirinya negara ini.[[9]](#footnote-9)

• Pedidikan Dasar

1. Taman Kanak-kanak (2-3 tahun)

Pertumbuhan anak selama prasekolah amat menentukan bagi perkembangannya lebih lanjut. Oleh sebab itu pendidikan taman kanak-kanak untuk anak-anak yang berumur sekitar 3 tahun., masa pendidikan prasekolah selama 3 tahun menjelang umur 6 tahun harus merupakan satu kesatuan. Walaupun demikian, bahan kurikulum dan metode belajar-mengajar untuk tingkat umur yang berbeda harus disesuaikan dengan tinkat perkembangan anak.

Pendidikan pra sekolah tidak diwajibkan sehingga orang tua dapat menentukan apakah anaknya mengikuti pendidikan itu selama satu, dua atau tiga tahun atau tidak sama sekali. Pendidikan di taman kanak-kanak tidak menjadi syarat memasuki sekolah dasar.

2. Sekolah Dasar (5-6 tahun)

Disini diberikan bekal-bekal dasar perkembangan kehidupan baik untuk diri sendiri dan lingkungan masyarakat. Tiap warga Negara Indonesia diwajibkan menempuh pendidikan yang sekurang-kurangnya dapat membekalinya dengan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dasar yang bisa disebut kemampuan melek huruf fungsional. Kemampuan ini meliputi membaca, menulis berhitung, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, ketrampilan dasar, serta pendidikan agamadan kewarganegaraan.

• Pendidikan Lanjutan

1. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (4 atau 3 tahun)

Sekolah ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai kelanjutan pendidikan dasar dan sebagai masa peralihan ke pendidikan lanjutan yang lebih tinggi.dari sini siswa harus menentukan pilihan akan melanjutkan ke sekolah lanjutan atas umum atau kejuruan. Pada sekolah ini diberikan pelajaran akademk untuk meneruskan pendidikan di jalur umum dan pelajaran ketrampilan untuk membantu penelusuran bakat ke jalur kejuruan

2. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (4 atau 3 tahun)

Segi-segi positif dan negative dari pemisahan sekolah lanjutan atas umum dan kejuruan. Dari segi perencanaan tenaga kerja sebainya itu memangharus ada. Walaupun demikian, perencanaan tenaga sukar dilakukan dengan tepat sehingga pendekatan tenaga kerja yang kaku dan ketat sering pula menimbulkan masalh pengangguran yang meresahkan. Dan untuk mengatasi hal itu perlu dipikirkan kemungkinan system sekolah komprehensif yang mempersiapkan siswanya untuk kemungkinan kerja dan kemungkinan meneruskan pedidikan ke perguruan tinggi maka kurikulumnya harus benar-benar intensif, baik untuk persiapan kerja maupun keperguruan tinggi. [[10]](#footnote-10)

• Pendidikan Tinggi

1. Perguruan Tinggi

Mempunyai fungsi ganda, yaitu mempersiapkan tenaga professional serta mengmbangkan ilmu dan teknologi. Dalam rangka pengandaan tenaga kerja professional, baik untuk pengembangan ilmu dan teknologi, dapat diadakan program gelar seperti program sarjana, pasca sarjana, dan program doctor.

Program gelar, terutama program doctor dan pasca sarjana, diperlukan pula untuk mempersiapkan tenaga penelitian dan penngajar dalam pengembangan ilmu dan teknologi.

Dalam rangka penggandaan tenaga profesionall dibawah sarjana dipakai program diploma yang diberikan baik di akademi maupun institute juga universitas. Dan untuk persiapan tenaga akademik dapat diadakan program gelar sarjana muda yang tidak terminal. Dan untuk meningkatkan jumlah peserta program doctor dapat dibuat program pasca sarjana untuk para sarjana yang ingin melanjutkan ke program doctor.

Pengunaan sisitem kredit juga dirasa menguntungkan di perguruan tinggi karena :

a. Mempermudah standarisasi beban studi antar jurusan dan fakultas

b. Mempermudah mobilitas akademik

c. Membantu administrasi multistrata yang memungkinkan sejumlah pintu masuk dan keluar.

d. Dapat mengubah disiplin pada dosen dan mahasiswa

e. Memungkinkan perhatian terhadap perkembangan individual.[[11]](#footnote-11)

• Pendidikan Luar Biasa

Merupakan pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa yang perkembangannya terhambat oleh factor-faktor fisik, psikologis, dan mental. Karena hal ini berkenaan dengan siswa yang mempunyai bakat perkembangan intelektual yang luar biasa, maka perlu diadakan sekolah khusus yang pelaksanaanya distur secara ketat.

Kebijakan –kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Orde Baru

Berdasarkan ketetapan MPRS dan MPR banyak dikeluarkan kebijakan berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, edaran , proyek peningkatan dan pengembangan pendidikan dalam sarana dan prasarana , kurikulum, metode.

Upaya yang dijalankan :

1) Pemberantasan buta Huruf

Sejak zaman penjajahan Belanda, pimpinan rakyat menyadari keterbelakangan bidang pendidikan yang terlihat banyaknya rakyat yang buta huruf sehingga sulit berkomunikasi. Usaha pemberantasan buta huruf dilakukan pemerintah pada tahun 1946 danb 1951 akan tetapi dari hasil sensus gagal.

Tujuan pemerintah melakukan Pemberantasan buta huruf untuk meningkatakan kecerdasan masyarakat guna meningkatkan taraf kehidupan social, ekonomi dengan cara kesempatan bagi yang buta huruf memperoleh ketrampilan membaca, menulis, dan menghitung.

Hasil sensus pada tahun 1971c menunjukkkan jumlah orang yang buta huruf di seluruh Indonesia masih sebanyak 32.21 juta (40 %) yaitu ornga yang tidaka bias membaca huruf latin.

Pada atahun 1972 pemerintah memperkenalkan pendidikan Aksarawan fungsional(functional literancy) yaitu memberikan pelajaran membaca, menulis dan berhitung serta ketrampilan tertentu. Gerakan PAF diberikan pada kelompok pekerja buta huruf (pertanian, perkebunan, pabrik , Dsb), diajar oleh ahli dibidangnya dan mengunakan alat peraga untuk memudahkan penyampian.Penyediaan bahan-bahan bacaan secara berkala, papan pengumuman, program kejar paket, dsb.

2) Pendidikan masyarakat dan pendidikan luar sekolah (PLS)

Pendidikan masyarakat (punmas) adalah pendidikan yang diberikan di luar sekolah formal yang ditujukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat. tujuan masyarakat adah mendidik masyarakat Indonesia untuk memiliki kemampuan mental, spiritual, dan keterampilam guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan pembukaan dan isi UUD 1945.

Isi pendidikan masyarakat adalah pendidikan agama dan budi pekerti, kecerdasan dan keterampilan, kewarganegaraan, berorganisasi, dan hidup mandiri. Usaha-usaaha pendidikan masyarakat dilakukan dengan Kursus-kursus, latihan-latihan, diskusi kelompok, penyuluhan, latihan berorganisasi, perpustakan masyarakat, kegiatan social edukatif. kursus atau latihan ialah dilakukan dalam jangka waktu pendek,praktis,untuk segera dapat menerapkan hasil pendidikan hasil pendidikan.[[12]](#footnote-12)

Pendidikan luar sekolah (PLS) yang siswanya berusia tua dibandingkan dengan usia pendidikan formal yaitu umur 10-24 tahun . materi yang diajarkan pengetahuan bercocok tanam, pemberantasan buta aksara dsb. Metode pngajaran dengan kursus, bahan bacaan, radio, Tv,penyuluhan dan media lainnya. Pelaksanaannya dilakukan oleh departemen P dan K, departemen dalam negeri, departemen tenaga kerja, departemen transmigrasi, departemen, pertaniaan, koperasi, departemen kesehatan, social, penerangan, agama dan lembaga-lembaga non pemerintah.

3) Kegiatan Inovasi pendidikan

Sejak awal REPELITA melakukan pemecahan masalah pendidikan dan pengembangan pemdidikan melalui kegiatan inovasi pendidikan. Berbagai proyek inovasi meliputi semua jenis dan tingkat pendidikan di dalam maupun luar sekolah seperti yang tertera dalam seminar inovasi pendidikan pada Jakarta , januari 1975:

a) Proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP).

Bersifat Nasional yang dilakukan pada tahun 1972 melalui delapan IKIP yaitu Jakarta, Bndung, semarang, Yokyakarta, Medan, Surabaya, Padanag, dan Ujung pandang. Menyusun master desain dan struktur bidang studi matematika, IPA, IPS, Bahasa dan lainnya dengan jenjang 5-3-3tahun. PPSP mengunakan pendekatan pengajaran sistem modul bersistem belajar tuntas (Mastery learning Basis) dengan sistem pemecahan masalah. Sehingga memungkinkann siswa SMP atau SMA lulus kurang dari 3 tahun. Jenis pilihan bidang studui sebagi jalur pendidikan seperti keterampilan mesin, otomotif, bangunan, listrik,elektronika, fotografi, pkk, kerajinan batik, pertanian dan sebagainya.

b) proyek pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru(PAMONG).

Berawal darikerjasama BP3K departemen P dan K dengan SEAMEO regional INNOTECH center di Sala, Jawa Jengah 1974-1979. yaitu dengan sistem pegajaran masal di sekolah dasar yang murah. Proyek ini adalah tindak lanjut dari seminar tentang” sistem penyampain belajar secara masal di sekolah dasar yang murah”. Gagasan diprakarsai oleh innotech di singapura pada tahun 1973. kurikulum dan bahan yang diajarkan sama dengan SD biasa yang diakhirnya mendapat STTB SD. SD PAMONG di ikuti anak putus sekolah yang dilakukan di berbagai temapat.anak bekerja bedasarkan Modul, penilaian dan rencana perbaikan di lakukan dengan petunjuk khusus yang disusun sendiri.

c) pendidikan pramuka untuk trasmigrasi[[13]](#footnote-13)

dimulai 1970 di Jombang, Jawa Timur. Umur 6-25 tahun dari hasil putus sekolah yang diminta bersedia bermigrasi keluar jawa agar tidak pindah ke kota –kota besar. Tujuan proyek adalah menjadikan penduduk desa agar menaruh minat terhadap pembangunan dan mengurangi minat penduduk pindah ke kota. Mengikuti pelatihan ketrampilan bidang perternakan, mengolah dan menjual beras, bercocok tanam, irigasi, dan panen yang disampaikan berupa program penyuluhan. Kegiatan ini bernaung di bawah badan pembangunan pendidikan kota jombang.

d) pusat kegiatan belajar

Proyek ini dimulai pertengahan tahun 1973 .proyek ini dilaksanakan di Jakarata, Jawa barat,Jawa timur, dan Sulawesi Selatan. teknik yang digunakan klasikal dengan mengunakan audio visual, ceramah, kerja kelompok, bimbingan, penyuluhan,pengajaran melalui radio local.

e) kuliah kerja nyata(KKN)

Dimulai tahun 1971-1972 oleh 3 universitas yang bertujuan melengkapi mahasiswa dengan pengalaman praktis tentang kebutuhan dan masalah pemabangunan masyarakat pedesaan, serta penyediaan tenaga kerja terdidik untuk membangun di 58.00 desa di seluruh Indonesia. Jadi menyediakan tenaga akademik yang terampil, berprakarsa, berpengalaman lansung secara praktis tentang kebutuhan dan masalah pembangunan masyarakat pedesaan.

f) badan usaha tenaga sukarela Indonesia (BUSTI)

Dimulai tahun 1969 dengan mengerahkan 30 orang di 2 desa untuk meningkatkan suasana gotong royong yang kemudian meningkat menjadi sekitar 1500 yang tersebar di 25 propinsi. Tujuan mempertahankan dan memperkuat gotong royong di kalangan generasi muda dengan cara melibatkan dalam kegiatan pembangunan pedesaan. Dari sukarelawan yang sudah dua tahun mengabdi di masyarakat pedesaan ditugaskan bekerja di luar negeri.[[14]](#footnote-14)

g) proyek pengembangan sistem informasi pendidikan dan kebudayaan

Dimulai tahun 1970 dengan menyempurnakan statistic pendidikan sehingga terciptalah bank data di BP3K. Tujuan proyek ini adalah tersedianya data dan informasi yang relevan, dapat dipercaya untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

h) Sekolah staf pemimpin administrasi (SESPA)

Dimulai tahun 1970 diikuti anggota administrasi, manajemen yang telah senior golongan IV berusia 35-48 tahun dan telah lulus Middle Management Course. Tujuan proyek adalah menciptakan adminstrasi dan manajemen yang efektifm kuat, bersih dan berkeahlian.

i) proyek perintis perencanaan integral pendidikan daerah (PROPIDA) di Sumatra dan Jawa Timur

proyek ini bertujuan teerciptanya model badan perencanaan pendidikan tingkat daerah. Dibantu Ford Foundation. Berpusat di padang dan Surabaya yang beryubungan resmi dengan BP3K dan gubernur .

j) Proyek percobaan radio pendidikan

Pengunaan siaran radio digunakan untuk membantu pendidikan yang dikirimkan ke sekolah-sekolah yang terpadu dalam pelajaran kelas. Tujuan proyek adalah ditemukan cara-cara yang efektif dari pengunaan radio untuk membantu kegitan pendidikan.

k) program pembinaan bakat.

Tujuan dari proyek ini adalah membantu murid dan mahasiswa berprestasi tinggi dalam belajar. Bantuan beasiswa bagi siswa atau maasiswa berbakat dan berprestasi yang berekonomi lemah. Badan beasiswa seperti Super Semar untuk yang berbakat istimewa.[[15]](#footnote-15)

l) proyek STM pembangunan.

Dimulai tahun 1967-1969 tujuan memperbaiki mutu pendidikan teknik. Mengunakan sistem modul seperti PPSP, lama studi 4 tahun. Tujuan proyek adalah memecahkan masalah relevansi, efektifitas dan efisiensi sekolah lanjutan di Indonesia .

m) sistem kegiatan pembelajaran oleh masyarakat.

Pengembangan sumber tenaga manusia dalam masyarakat diartikan sebagai pengunaan sumber-suimber pendidikan dalam masyarakat dapat. Tujuan proyek ini adalah teridentifikasinya berkembangnya sistem kegitan belajar oleh masyarakat sesuai dengan sumber-sumber pendidikan dan kebutuhan pendidikan dalam masyarakat. Sasaran proyek anak umur 10-24 tahun. Lokasi proyek di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dan Indramayu Jawa Barat. Berdasarkan prinsip belajar seumur hidup pendidikan dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa batasan usia.

n) penggunaan sistem perencanaan dan program anggaran (PPBS) di pendidikan tinggi.

Proyek pengembangan pedidikan tinggi sebagai unit departemen pendidikan dam kebudayaan Ditjen pendidikan tinggi bertanggung jawab mengarahkan dan mengelola 40 universitas dan istitut negeri masalah anggaaran belanja dan bertanggung jawab atas 300 universitas swasta dan perguruan tinggi swata. Tujuan proyek ini adalah menunjang semua usaha pelaksanaan rencana strategis yang maksimum dan terordinasi sumber, dan pengembangan univeritas dan institute dengan potensi yang tersedia.

o) sistem informasi pengelolaan di pendidikan tinggi.

Tujuan proyek ini adalah terlayaninya informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan untuk pererncanaan strategis , perencanaan operasional , monitoring, dan penilaian dan menjamin terselenggaranya pengelolaan perguruaan secara nasional.proyek ini merupakan jaringan sistem informasi penelolaan yang berlaku secara nasional lingkungan Departemen pendidikan dan kebudayaan.

p) proyek pendidikan guru.

Meliputi pendidikan guru dan pengabdian masyarakat. Rencana pengujian guru untuk dapat ,melaksanakan kurikulum baru. Tujuan proyek ini adalah memiliki lembaga pendidikan guru untuk segala jenis dan tingkat yang bersifat In-service maupun pre-service yang terkoordinasi dalam satu jaringan. Merupakan proyek pengembangan perkembangan pendidikan guru. Proyek ini menyusun rencana kemudian mengujinya sehingga guru mampu melaksanakan kurikulum baru.[[16]](#footnote-16)

q) pengembangan sekolah luar biasa( untuk anak cacat).

Tujuan proyek adalah pengembangan sistem pendidikan yang sempurna dan efektif untuk anak-anak cacat. Bantuan di bidang keahlain, keuangan , dan pengalaman khusus menunjang kegiatan sekolah untuk anak buta, tuli,cacat mental, cacat jasmani dan anak-anak nakal.

r) pemerataan pendidikan teknologi

pendidikan dan pengembangan kebudayaan merupakan jalan yang ditempuh dalam usaha mencapai cita-cita dengan cara pemerataan kesempatan dan p[emerataan mutu pendidikan seluas mungkin bagi masyarakat. Dengan mengunakan media serangkaian acara program yang disiarkan oleh studio RRI dan radio pemerintah berupa penataran guru, pemanfaatan televise siaran terbatas atau Closed circuit television (CCTV) dalam pelaksanaan perkuliahan mata kuliah dasar secara bersama-sama. Mengembangkan media pembelajaran radio, TV, kaset, slide, dan film serta bahan cetakan.

s) pengunan berbagai media untuk penataran guru

penataran guru dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga setiap guru mengusai bidang studi yang diajarkan dan memperoleh keterampilan mengajar dan kompetensi yang diperlukan dalam profesinya pusat penataran guru tingkat nasional dimaksudkan untuk menatar para pelatih, sedangkan pusat penataran guru di tingkat daerah menatar semua guru. Dengan mengunakan media pembelajaran modrn seperti radio, televisi, satelit domestic, percetakan,dan sebagainya. Proyek ini diorganisasikan oleh Ditjen pendidikan dasar dan menegah bersama BP3K.

pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi komunikasi untuk komunikasi pendidikan pengunaan berbagai media untuk penataran guru

t) proyek pendidikan IPA untuk sekolah lanjutan umum

Tujuan proyek adalah mengatasiu kekurangan-kekurangan agar lulusan SMP dan SMA b akan memahami pelajaran IPA. Persiapan proyek tahun 1974 dengan pam eran alat-alat IPA yang terdeteksi 80% diimpor dan 20 % buatan dalam negeri. Pada tahun 1979/1980 proyek pembakuan sarana pendidikan dan kebudayaan menyusun daftar jenis dan sepesufikasi alat peraga dan alat praktek IPA. Pada tahgun 1982 diterbitkan buku petunjuk pembuatan dan pengunaan alat peraga sederrhana IPA.[[17]](#footnote-17)

u) sekolah menengah pertama (SMP) terbuka.

SMP terbuka kegiatan belajarnya Di selengarakan di luar gedung dengan metode tatap muka dan media dan interaksi tatap muka antara guru dan murid. TUjuan SMP terbunka membuka kesempatan bagi warga masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat SMP karena tidak mampu melanjutkan SMP formal. Siswa m,engikuti dan melaksanakan kegitan di tempat mereka masing-masing tatap muka dengan guru berlangsung 6 jam tiap minggu, selebihnya siswa belajar mandiri.mengunakan media radio program kaset atau slide. Tujuan pembelajaran SMP terbuka dengan SMP biasa yaitu agar lulusannya berjiwa pancasila , mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi atau langsung terjun ke masyarakat, siaran radio, pengawasan orang tua, atau orang tua. Lama pelajaran 6 jam.

v) proyek pengembangan pendidikan guru (P3G).

Dimulai tahun 1977 pembinaan dan perbaikan kualitas pendidikan guru dengan lokakarya , penyediaan sarana prasarana berupa pembangunan pusat sumber belajar (PSB) berisi pengembangan kurikulum pendidikan guru. Penataran dan latihan oleh guru dan dosen menerapkan metode cara belajar siswa aktif (CBSA) dan pengembangan sistem pendidikan guru berdasarkan kemampuan (PGBK).

w) program akta mengajar V.

Ditujukan kepada staf akademik perguruan tinggi untuk memegang jabatan (kenaikan pangkat)dari III/d ke IV/a. model penyelenggaraan dengan belajar jarak jauh dengan nsistem paket belajar berupa Modul dan tatap muka dengan metode kuliah , diskusi, buku dan media lain dengan tata kulih dan praktikum mengajar. Tujuan program ini adalah menghasilkan tenaga pengajar yang mempunyai wewenang mengajar di perguruan tinggi (Diploma atau Sarjana) serta menciptakan masyarakat akademik yang ideal di perguruan tinggi.

x) wajib belajar (Wajar)

dimulai tanggal 2 mei 1984 dittapkan oleh presiden Soeharto ssehingga tanggal 3 Mei 1984 serentak 3 kabinet pembangunan IV merencanankan kembali pelaksanaan wajib belajar di tiga wilayah Indonesia. Mendagri Soepardjo Roestam , menteri agama H. Munawir Sjadzali MA, dan Men dikbud Prof.Dr. NUgraoho Notosusanto. Gerakan wajib belajar merupakan program 2 juta anak usia sekolah 7-12 tahun dapat mengenyam dan mecmperoleh pendidikan khususnya ndi jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Reguler, SD kecil, SD PAMONG, kejar paket 4 dan madrasah ibtidaiyah.

y) universitas terbuka(UT).

ketetapan presiden no.41 tahun 1984 tanggal 11 juni 1984 UT bersetatus universitas Negeri dengan 4 fakultas ( fakultas keguruan dan pendidikan , fakultas ekonomi, fakultas ilmu social, fakultas politik, fakultas matematika dan pengetahuan alam.

UT memiliki puast penelitian dan pengabdian masyarakat, pusat produksi media pendidikan, informasi dan pengolahan data, pusat pengolahan penujian dan unit program belajar jarak jauh. Peresmian Ut dilakukan oleh presiden Suharto di Bima Graha Jakarta pada tanggal 4 September 1984 terdiri atas tiga program yaitu program Diploma, program Akta V, dan Program Sarjana. Sebagai rector pertama tahun1984 di tunjuk Prof.Dr. Setijadi MA.[[18]](#footnote-18)

4) Pembinaan generasi muda

Pada cabinet pembanguna III ( sejak 31 Maret 1978) dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan diangkat menteri muda urusan pemuda fijabat oleh Doktor Abdul Gafur. Pada cabinet pembangunan V ditingkatkan menjadi menteri urusan pemuda dan olah raga (MEMPORA yang masih di jabat Dr. Abdul Gafur.

Pemuda tergabung dalam organisasi-organisasi pemuda, olah raga dan seni budaya. Pada periode 1965-1975 diawalai kelahiran KAMI dan memudarnya ekstitensi PPMI dan MMI yang organisasinya tergabung dalam KAMI. Lahir pula organisasi-organisasi pemuda pelajar seperti KAPPI dan KAPI. Dalam penataan struktur dan segi kehidupan bangsa organisasi ini kembali poada p;ola berfikir lama yang menyebabkan keretakan-keretakan sehingga bersatunya organisasi kembali pada organisasi induk.[[19]](#footnote-19)

Pada tahun 1973 lahirlah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang terorganisir dalam 3 jalur (TAP MPR NO.III/MPR/1983):

a. jalur SMTP(SMP) dan SMTA(SMA)---organisasi intra sekolah(OSIS).

b. Jalur Kampus(mahasiswa)---organisasi Mahasiswa Intra Universiter.

c. Jalur kemasyarakatan ---KNPI, organisasi, mahasiswa ekstra Universiter, organisasi-organisasi pemuda,pramuka, organisasi-organisasi olahraga, dan lain-lain.

Generasi muda adalah generasipenerus cita-cita perjuangan bangsa , sehingga pemuda dipersiapkan sehingga menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup Negara dan angsa , jaminan kelestariam pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta kesinambungan pembangunan nasional.

Pendekatan pembinaan pemuda di dekati dengan program-program yang lebih terarah sesuai dengan GBHN. Melalui beberapa program yaitu:

a) Patriotisme dan idealisme

b) Kepribadian dan budi luhur

c) Kesegaran jasmani dan daya kreasi

d) Ketrampilan dan kepemimmpinan

Dampak yang ditimbulkan

Namun pada waktu itu tak ada yang berani bicara. Pada masa itu tidak ada lagi perbedaan pendapat sehingga melahirkan disiplin ilmu yang semu dan melairkan generasi yang latah dan penakut. Pada masa pemerintahan orde baru pertumbuhan ekonomi tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik, melainkan bergantung pada utang luar negeri sehingga menghasilakan sistem pendidikan yang tidak peka terhadap daya saing dan tidak produktif.

Pendidikan tidak mempunyai akuntabilitas sosial karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam merancang sistem pendidikan karena semua serba terpusat. Dengan demikian, pendidikan pada masa itu mengingkari pluralisme masyarakat sehingga sikap teloransi semakin berkurang, yang ada adalah sikap egoisme.

Lalu, apa yang terjadi? Pendidikan yang maju hanya di pulau Jawa sementara di daerah lain sistem pendidikannya kurang maju karena kurangnya keberterimaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Akhirnya, penerapan pendidikan tidak diarahkan pada kualitas melainkan pada kuantitas. Hal ini menimbulkan peningkatan pengangguran dari berbagai jenjang. Banyak lulusan, tetapi tidak punya pekerjaan. Pada masa itu akuntabilitas pendidikan masih sangat rendah.[[20]](#footnote-20)

KESIMPULAN

Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan umat manusia sebagai genarasi yang memajukan sebuah bangsa. Dalam konsep dan implentasi pendidikan harus memperhitungkan berbagai faktor. Konsep pendidikan harus disesuaikan dengan keinginan, ukuran, mental, budaya, sosial, ekonomi, dan politik sebuah kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Demikian juga konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah orde baru , sebelum maupun setelahnya seringkali menganak tirikan pendidikan. Pendidikan mempunyai anggaran paling kecil dari dana APBD dan sistem pendidikan yang terpusat atau dengan istilah sentralilasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk.

1. Nugroho, Notosusanto. 1990*. Sejarah Nasional Indonesia* Jilid 1-6, Jakarta: Balai Pustaka hlm 122. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mulyono,Dotto. 1985, *Kekuasaan MPR tidak Mutlak*, jakarta, Erlangga hlm 95. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sunny, Ismail,1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 22. [↑](#footnote-ref-3)
4. Adinoto,1992, *Indonesia pada Orde Baru*, jakarta,Erlangga,hlm 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hj. Enung K Rukiati, dkk, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, pustaka setia bandung, hlm.65. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ivan Sujatmoko, *Perkembangan Pendidikan Guru Pada masa orde lama dan orde baru*, pressmedia, hlm 90. [↑](#footnote-ref-6)
7. HAR Tilaar,2000*, Paradigma Pendidikan Nasional*, Jakarta ,Rineka Cipta, hlm 130. [↑](#footnote-ref-7)
8. M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern....,hlm.558 [↑](#footnote-ref-8)
9. Asvi Warman Adam*, Membongkar Manipulasi Sejarah*, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ajip Rosidi,1991, *Ikhtisar Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung : Binacipta,hlm 31. [↑](#footnote-ref-10)
11. Haryatmoko, “Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis”, dalam buku *Menemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008), hlm. 67. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rianti Nugroho, *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi,dan Strategi*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.15-16. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kartini Kartono, Tujuan *Pendidikan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita,  1997), hlm 49-50. [↑](#footnote-ref-13)
14. David Jankin, *Soeharto dan Barisan Jenderal Orba*, (Depok: K Bambu, 2010), terj. h. 17 [↑](#footnote-ref-14)
15. Usman, Sjarif.1972, *Mengapa Rakyat Indonesia Mendukung presiden Soeharto*, cetakan ke III jakarta hlm 72. [↑](#footnote-ref-15)
16. “Link and match” merupakan upaya pemerintah pada waktu itu untuk mengurangi pengangguran terdidik, dengan maksud untuk menyesuaikan antara jumlah lulusan dengan kebutuhan pasar. Hal ini dijelaskan dalam UU yang dibuat pada tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi “pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik…bagi peranannya di masa yang akan datang”. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sugiono, Ed.*Tahap-tahap pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Kmpas, 2005), hlm 74 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Cemerlang, 2005),  hlm. 102. [↑](#footnote-ref-18)
19. [↑](#footnote-ref-19)
20. Moh. Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*. (Jogjakarta: Ar Ruz, 2009), hlm. 87. [↑](#footnote-ref-20)